

STUDI KELAYAKAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BEKASI

Fernandes Simangunsong³

Abstrak

Data menunjukkan di era reformasi sejak tahun 1999 hingga sekarang tercatat 171 daerah otonom baru telah terbentuk, terdiri atas 7 (tujuh) provinsi, 135 kabupaten dan 31 kota, yang diusulkan oleh daerah berdasarkan aspirasi masyarakat. Fakta tersebut menggambarkan bahwa dalam perjalanan implementasi kebijakan otonomi daerah, pemekaran/pembentukan daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota telah banyak dilakukan. Hal ini dapat dimaklumi, sebab substansi pemekaran/pembentukan daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan organisasi pemerintah kepada masyarakat. Melalui pemekaran/pembentukan daerah diharapkan tujuan kebijakan otonomi daerah seperti peningkatan pelayanan, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Kata kunci : Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Pelayanan Publik.

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bekasi



Sumber : Kab. Bekasi Dalam Angka 2007

PENDAHULUAN

Kondisi faktual Kabupaten Bekasi saat ini dengan wilayah seluas 127.388 ha, dan jumlah penduduk sebanyak 2.027.092 jiwa, dengan tingkat kepadatan 1.465 jiwa per km², serta susunan administrasi pemerintahan yang terdiri dari 23 kecamatan, 187 desa, dapat memberikan gambaran beban penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan.

Adanya aspirasi masyarakat di Kabupaten Bekasi yang menghendaki adanya pemekaran/pembentukan daerah otonom baru di wilayah Bekasi Selatan perlu mendapat respon dari berbagai pihak utamanya Pemerintah Daerah dan DPRD

sebagai wakil rakyat. Hal ini seiring dengan penjelasan undang-undang dimaksud bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Persoalannya apakah aspirasi yang muncul ini dapat menjamin peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Persoalan itu hanya dapat dijawab secara obyektif jika terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Bekasi, dan sekaligus menggali aspirasi dan pendapat

³ Dosen IPDN

masyarakat melalui instrumen wawancara langsung dan kuesioner atau daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden sesuai tujuan penelitian. Pemekaran Kabupaten Bekasi sebaiknya dilakukan jika terjadinya pemekaran akan berdampak positif terhadap peningkatan dan pemerataan pembangunan dan pelayanan umum.

Pengkajian kemungkinan pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Salah satu prosedur pembentukan/pemekaran daerah menurut ketentuan tersebut adalah ada kemauan politik dari pemerintahan daerah dan masyarakat yang bersangkutan.

Disamping itu pengkajian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat teknis, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (4) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemekaran daerah dapat dilakukan berdasarkan syarat teknis yang mencakup faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah. Dalam penjelasan ketentuan dimaksud disebutkan pula bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah otonom memerlukan penilaian dengan menggunakan indikator yang tersedia.

Sehubungan dengan itu, kiranya perlu segera dilakukan pengkajian potensi daerah dalam rangka mengukur dan mengevaluasi variabel atau kriteria potensi daerah yang dipersyaratkan untuk mengetahui dapat atau tidaknya pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Bekasi melalui penelitian mendalam terhadap "Studi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Bekasi".

Perumusan Masalah

Dalam konteks upaya pemekaran Kabupaten Bekasi, permasalahan sementara yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah :

- 1) Bagaimanakah gambaran tingkat kemampuan daerah kabupaten Bekasi dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah;
- 2) Apakah dimungkinkan untuk melakukan pemekaran wilayah berdasarkan kriteria pemekaran daerah yang sesuai dengan persyaratan 11 (sebelas) faktor antara lain : kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali.
- 3) Bagaimanakah gambaran aspirasi masyarakat mengenai wacana pemekaran wilayah di Kabupaten Bekasi saat ini?
- 4) Bagaimanakah kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kabupaten Bekasi?
- 5) Bagaimanakah ketersediaan pelayanan dasar di Kabupaten Bekasi?

Sejalan dengan hal tersebut, masalah penelitian dapat dibatasi dengan fokus penelitian berupa pengukuran dan penilaian terhadap variabel yang merupakan persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran daerah, antara lain kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kemampuan keuangan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, dan rentang kendali, yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah seperti faktor keamanan, ketersediaan sarana pemerintahan dan rentang kendali. Penelitian ini juga menyertakan jajak pendapat guna memastikan kemurnian aspirasi masyarakat untuk membentuk daerah otonom baru dalam wilayah Kabupaten Bekasi. Selain itu, fokus dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi.

KERANGKA PEMIKIRAN

Tujuan kebijakan otonomi daerah sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratisasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tercapainya tujuan kebijakan otonomi daerah, sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan daerah dalam memanfaatkan kewenangan daerah otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Tingkat kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonominya dapat dilihat dari kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Atas dasar itu, kesimpulan sementara yang dapat diambil bahwa tingkat kemampuan daerah direfleksikan oleh kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah merupakan **faktor dominan** dalam menentukan keberhasilan dan sekaligus kegagalan pencapaian tujuan kebijakan otonomi daerah.

Jika dicermati, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus, terutama Pasal 4 ayat (1) tampak bahwa dalam rangka pendayagunaan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, dimungkinkan diambil kebijakan setingkat undang-undang untuk pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah otonom.

Kebijakan berupa pedoman yang mengatur syarat pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Pengukuran dan penilaian dilakukan terhadap tingkat kemampuan daerah yang digambarkan oleh indikator dan sub indikator dari faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas wilayah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan dan rentang kendali.

Hasil pengukuran adalah jumlah skor tertentu dari tingkat kemampuan daerah yang merupakan dasar penilaian apakah suatu daerah layak atau tidak untuk dimekarkan. Penilaian tingkat kemampuan daerah dalam rangka pemekaran adalah penilaian terhadap potensi kecamatan. Hasil penilaian dapat dikategorikan ke dalam 5

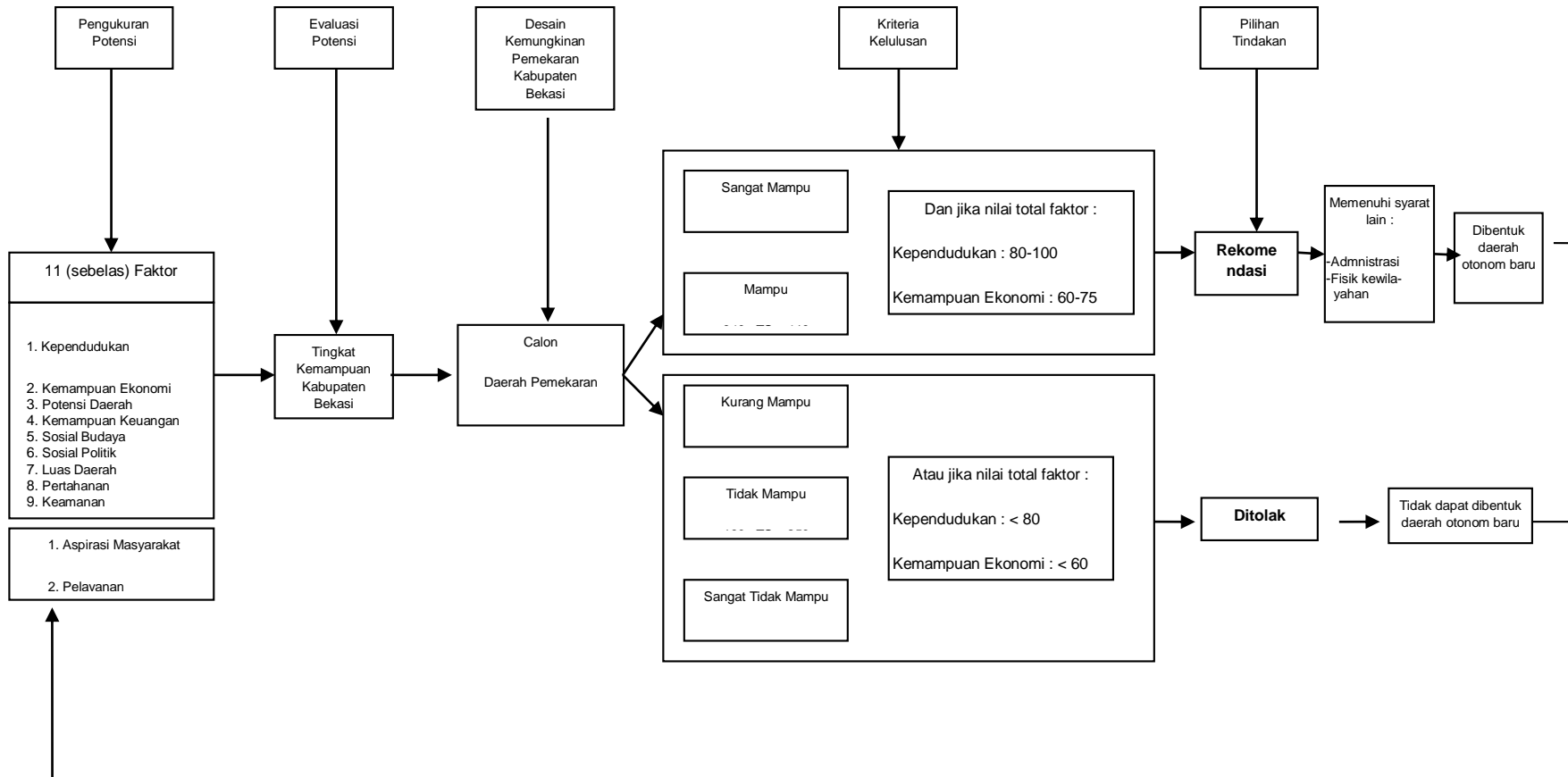
(lima) tingkatan yaitu : **Sangat Mampu, Mampu, Kurang Mampu, Tidak Mampu dan Sangat Tidak Mampu.**

Hasil penilaian merupakan rekomendasi kebijakan, sebagai berikut:

- (i) Suatu daerah direkomendasikan menjadi daerah otonom apabila daerah induk dan calon daerah yang akan dibentuk mempunyai nilai total dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) dan perolehan jumlah nilai faktor kependudukan (80-100), kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75)
- (ii) Usulan pembentukan daerah ditolak apabila daerah induk atau calon daerah yang akan dibentuk mempunyai nilai dengan kategori kurang mampu, tidak mampu, dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan jumlah nilai faktor kependudukan kurang dari 80, faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau perolehan jumlah nilai faktor potensi daerah kurang dari 60, atau perolehan jumlah nilai faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

Jelasnya kerangka pemikiran pemekaran Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada diagram berikut:

GAMBAR
KERANGKA PEMIKIRAN



Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui gambaran tingkat kemampuan daerah Kabupaten Bekasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 2) Untuk mengetahui disain kemungkinan pembentukan daerah otonom baru berdasarkan kriteria pemekaran daerah sebagai dasar penentuan rekomendasi kebijakan dapat atau tidaknya dibentuk daerah otonom baru dalam wilayah Kabupaten Bekasi.
- 3) Untuk mengetahui gambaran tingkat partisipasi masyarakat terhadap wacana pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Bekasi.
- 4) Untuk mengetahui tingkat ketersediaan pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan aplikasi model pengukuran dan evaluasi terhadap kemampuan daerah Kabupaten Bekasi yang akan menggambarkan dan menjelaskan tingkat kekuatan atau pengaruh variabel yang diamati terhadap tingkat kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui secara obyektif dan mendapat tingkat kemampuan daerah Kabupaten Bekasi dalam penyelenggaraan otonominya melalui pengukuran terhadap indikator dan sub indikator dari faktor kependudukan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali pemerintahan.

Berdasarkan pegenalan terhadap tingkat kemampuan daerah, maka selain dapat disusun berbagai alternatif desain pemekaran wilayah dan sekaligus ditentukan disain pemekaran terbaik, dapat pula ditentukan pilihan prioritas tindakan guna peningkatan potensi daerah.

Unit analisis pengkajian kemampuan daerah adalah organisasi pemerintah daerah pada tingkat kabupaten dan kecamatan. Sedangkan populasi organisasi pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi atau 23 (dua puluh tiga) kecamatan dan 187 desa yaitu :

Tabel
Jumlah Kecamatan dan Desa
di Kabupaten Bekasi

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jlh Desa
		Ha	%	
1	Setu	6.216	4,88	11
2	Serang Baru	6.380	5,01	8
3	Cikarang Pusat	4.760	4,06	6
4	Cikarang Selatan	5.174	3,74	7
5	Cibarusah	5.039	4,03	7
6	Bojongmangu	6.006	4,21	6
7	Cikarang Timur	5.131	3,40	8
8	Kedungwaringin	3.153	3,96	7
9	Cikarang Utara	4.330	4,71	11
10	Karang Bahagia	4.610	2,48	8
11	Cibitung	4.530	3,62	7
12	Cikarang Barat	4.369	3,56	11
13	Tambun Selatan	4.310	3,38	10
14	Tambun Utara	3.442	2,70	8
15	Babelan	6.360	4,99	9
16	Tarumajaya	5.463	4,29	8
17	Tambelang	3.791	5,27	7
18	Sukawangi	6.719	2,98	7
19	Sukatani	3.752	2,95	7
20	Sukakarya	4.240	3,33	7
21	Pebayuran	9.634	7,56	13
22	Cabangbungin	4.970	3,90	8
23	Muaragembong	14.009	11,00	6
Kabupaten Bekasi		127.388	100	187

Operasionalisasi variabel kajian dibatasi berdasarkan 11 (sebelas) faktor sebagai variabel penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan atas variabel kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang merupakan fokus pengamatan yang dibedakan atas :

- 1) Data Primer, diperoleh dengan penelitian lapangan, dilakukan dengan jalan melihat, mengamati, mencatat serta mewawancarai secara langsung pejabat politik, aparatur daerah, tokoh masyarakat dan kelompok sasaran lainnya;
- 2) Data Sekunder, dikumpulkan untuk melengkapi data primer, baik yang tersedia di BPS setempat, Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas Daerah, Badan/Kantor baik tingkat kabupaten maupun provinsi, dan instansi lain yang mempunyai informasinya berkaitan dengan topik penelitian ini terutama pada tingkat kecamatan. Data sekunder ini diperoleh dengan penelitian terhadap dokumen, laporan, brosur, surat kabar dan bahan kepustakaan lainnya.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipilih dalam riset lapangan adalah:

- 1) Observasi, suatu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, peristiwa dan aspek-aspek yang diteliti di lokasi penelitian;
- 2) Wawancara, mengumpulkan data dengan komunikasi langsung berdasarkan kerangka atau pedoman yang telah disusun sebelumnya dengan pihak yang berkompeten dan berwenang terhadap masalah yang diteliti;
- 3) Kuesioner, penyebaran angket atau daftar pertanyaan yang telah tersedia yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang obyektif dan merupakan salah satu pengumpulan data yang diketahui dan dipahami oleh responden sehingga hasilnya obyektif.
- 4) Studi literatur, mengumpulkan data dengan mempelajari, menelaah dan menganalisa literatur, dokumen, peraturan serta referensi lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Data kualitatif akan dianalisa melalui pendekatan **isi dan kedalaman** menterjemahkan suatu fenomena kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan dan rentang kendali. Cara mengakomodasi analisa kualitatif adalah dengan menstimulasi berbagai kecenderungan jawaban kualitatif dari responden terhadap fenomena tersebut.

Dari daftar struktur pertanyaan terbuka, kemudian dilengkapi dengan kompilasi hasil wawancara secara mendalam, kemudian dengan pengamatan di lapangan kemudian variabel itu akan dikompilasi melalui file terstruktur. Namun sebagian dari data kualitatif direnovasi menjadi data kuantitatif melalui *non-parametric process*.

Sedangkan data kuantitatif akan dikategorikan, diklasifikasi dan diolah sebagai dasar **pengukuran dan analisis untuk memberikan penjelasan dan penilaian** terhadap kekuatan dan kelemahan variabel kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain dalam mendorong

kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Kategori penilaian berdasarkan **skala tertentu** dan ditetapkan menurut klasifikasi **sangat mampu, mampu, kurang mampu tidak mampu dan sangat tidak mampu** berdasarkan jumlah skor tertentu yang representatif, dimana kategori penilaian menjadi dasar pilihan tindakan untuk memekarkan atau tidak memekarkan daerah otonomi dan pendayagunaan potensi daerah.

Metode penilaian yang digunakan adalah sistem skoring yang terdiri dari 2 (dua) macam metode sebagai berikut:

▪ **Metode 1 (Metode Rata-rata)**

Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah disekitarnya. Semakin tinggi perolehan besaran/nilai calon daerah dan daerah induk (apabila dimekarkan) terhadap besaran/nilai rata-rata, maka semakin besar skornya. Metode 1 digunakan untuk menghitung besaran/nilai indikator 2 s.d. 28 dan 30 s.d 34.

▪ **Metode 2 (Metode Kuota)**

Metode kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring terhadap calon daerah maupun daerah induk. Metode 2 khusus digunakan untuk indikator 1, yakni indikator jumlah penduduk.

Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5. besaran/nilai rata-rata pembandingan dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, dan pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata.

Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan Pembandingan Provinsi, pembentukan kabupaten menggunakan Pembandingan Kabupaten dan pembentukan kota menggunakan

Pembanding Kota. Pembanding Kabupaten adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang bersangkutan, sedangkan pembanding Kota adalah kota-kota sejenis (tidak termasuk kota yang menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota. Dalam hal menentukan pembanding provinsi, pembanding kabupaten dan pembanding kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan.

Khusus indikator karakteristik wilayah (No. 31), pemberian skor ditentukan berdasarkan ciri yang ditunjukkan oleh hamparan permukaan fisik calon daerah otonom (berupa daratan, atau daratan dan pantai/laut, atau kepulauan, dan posisi calon daerah otonom berbatasan dengan negara lain atau tidak berbatasan dengan negara lain). Pemberian skor pada indikator karakteristik wilayah, diukur dengan kriteria sebagai berikut :

**TABEL
KRITERIA DAN SKOR
KARAKTERISTIK WILAYAH**

NO	KRITERIA	SKOR
1.	Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan	5
2.	Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan dan pantai	4
3.	Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan	3
4.	Tidak berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan, daratan dan pantai, atau daratan	2

Asumsi yang digunakan dalam **pembobotan** adalah setiap faktor dan indikator kriteria mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom.

No	FAKTOR DAN INDIKATOR	BOBOT
1	2	3
1.	Kependudukan	20
	1. Jumlah Penduduk	15
	2. Kepadatan	5
2.	Kemampuan Ekonomi	15

	3. PDRB Non Migas Per Kapita	5	
	4. Pertumbuhan Ekonomi	5	
	5. Kontribusi PDRB non migas	5	
3.	Potensi Daerah		15
	6. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 penduduk	2	
	7. Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 penduduk	1	
	8. Rasio pasar per 10.000 penduduk	1	
	9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1	
	10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1	
	11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	1	
	12. Rasio Fasilitas kesehatan per per 10.000 penduduk	1	
	13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1	
	14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau perahu kapal motor	1	
	15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1	
	16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan motor	1	
	17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	1	
	18. Persentase penduduk yang bekerja	1	
	19. Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap penduduk	1	
4.	Kemampuan Keuangan		15
	20. Jumlah PDS	5	
	21. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	5	
	22. Rasio PDS terhadap PDRB	5	
5.	Sosial Budaya		5

	23. Rasio Sarana Peribadatan per 10.000 penduduk	2	
	24. Rasio Fasilitas Lapangan Olahraga per 10.000 Penduduk	2	
	25. Jumlah Balai Pertemuan	1	
6.	Sosial Politik		5
	26. Rasio penduduk yang ikut Pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih	3	
	27. Jumlah organisasi kemasyarakatan	2	
7.	Luas Daerah		5
	28. Luas wilayah keseluruhan	2	
	29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	3	
8.	Pertahanan		5
	30. Rasio Jumlah Personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	3	
	31. Karakteristik Wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan	2	
9.	Keamanan		5
	32. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	5	
10	Tingkat kesejahteraan masyarakat		5
	33. Indeks Pembangunan Manusia	5	
11	Rentang Kendali		5
	34. Rata-rata jarak kecamatan ke pusat pemerintahan	2	
	35. Rata-rata waktu perjalanan dari kecamatan ke pusat pemerintahan	3	
Total			100

Skor minimal kelulusan adalah jumlah nilai indikator pada setiap faktor kriteria dikali skor di atas rata-rata untuk setiap variabel atau kelompok kriteria dikali bobot untuk setiap kelompok indikator. Kelulusan ditentukan oleh jumlah nilai faktor dengan kategori :

Tabel Kategori Penilaian

KATEGORI	NILAI			KETERANGAN
1. Sangat Mampu	420	s.d.	500	Rekomendasi
2. Mampu	340	s.d.	419	Rekomendasi
3. Kurang Mampu	260	s.d.	339	Ditolak
4. Tidak Mampu	180	s.d.	259	Ditolak
5. Sangat Tidak Mampu	100	s.d.	179	Ditolak

Suatu daerah direkomendasikan menjadi daerah otonom apabila daerah induk dan calon daerah yang akan dibentuk mempunyai nilai total nilai dengan kategori **sangat mampu** (420-500) atau **mampu** (340-419), dan perolehan jumlah nilai faktor kependudukan (80-100), kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75), dan faktor kemampuan keuangan (60-75).

Usulan pembentukan daerah ditolak apabila daerah induk atau calon daerah yang akan dibentuk mempunyai total nilai dengan kategori **kurang mampu**, **tidak mampu** dan **sangat tidak mampu** dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan jumlah nilai faktor kependudukan kurang dari 80, atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau perolehan jumlah nilai faktor potensi daerah kurang dari 60, atau perolehan jumlah nilai faktor kemampuan keuangan kurang dari 60. Seluruh perhitungan dan analisa statistik dalam tulisan ini menggunakan alat bantu komputer dengan paket program **Microsoft Excel dan Microstat**.

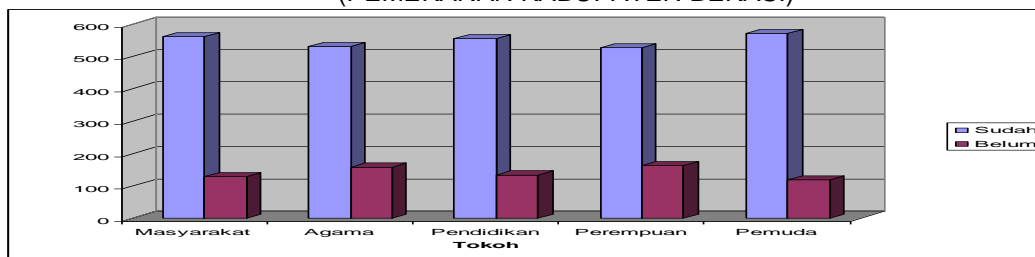
HASIL PENELITIAN Analisis dan Interpretasi Data Tentang Aspirasi Masyarakat

Hasil pengolahan dan analisa data aspirasi masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Bekasi dalam rangka pembentukan daerah otonom baru (pemekaran Kabupaten Bekasi) dapat digambarkan dan dijelaskan sebagaimana tabel dan diagram berikut ini :

TABEL
BERITA RENCANA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU
(PEMEKARAN KABUPATEN BEKASI)

Pertanyaan	Tokoh	Sudah		Belum		Jumlah
		F	%	F	%	
1. Apakah Bapak/Ibu sudah mendengar keinginan dari beberapa komponen/ bagian masyarakat mengenai rencana pembentukan daerah otonom?	Masyarakat	561	81%	129	19%	690
	Agama	532	77%	158	23%	690
	Pendidikan	556	81%	134	19%	690
	Perempuan	527	76%	163	24%	690
	Pemuda	571	83%	119	17%	690
Total						3450

DIAGRAM
BERITA RENCANA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU
(PEMEKARAN KABUPATEN BEKASI)



Sumber : Hasil Pengolahan Angket

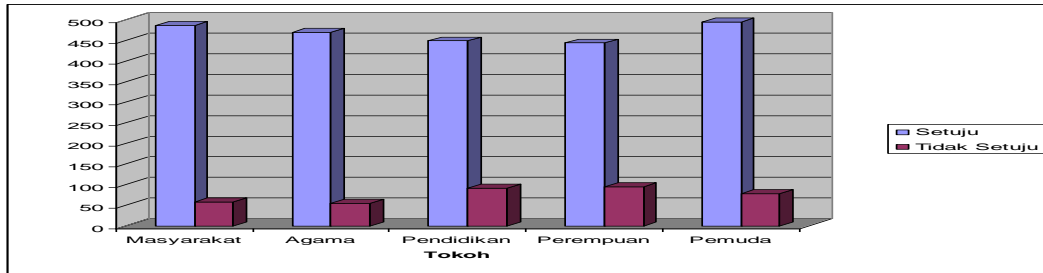
Responden dalam menjawab pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu sudah mendengar keinginan dari beberapa komponen/ bagian masyarakat mengenai rencana pembentukan daerah otonom baru (Pemekaran Kabupaten Bekasi) ? Tokoh masyarakat yang menjawab sudah yaitu 561 orang dan sisanya menjawab belum yaitu 129 orang, Tokoh agama yang menjawab sudah yaitu 532 orang dan sisanya menjawab belum yaitu 158 orang, Tokoh pendidikan yang menjawab sudah yaitu 556

orang dan sisanya menjawab belum yaitu 134 orang, Tokoh perempuan yang menjawab sudah yaitu 527 orang dan sisanya menjawab belum yaitu 163 orang, Tokoh pemuda yang menjawab sudah yaitu 571 orang dan sisanya menjawab belum yaitu 119 orang. Dengan demikian sebagian besar masyarakat cenderung sudah mendengar mengenai rencana pembentukan daerah otonom baru (Pemekaran Kabupaten Bekasi).

TABEL
TANGGAPAN RESPONDEN DI KABUPATEN BEKASI
YANG SUDAH MENDENGAR

Pertanyaan	Tokoh	Setuju		Tidak Setuju		Jumlah sudah
		f	%	f	%	
2. Bila sudah mendengar, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu?	Masyarakat	486	89%	58	11%	544
	Agama	469	90%	54	10%	523
	Pendidikan	448	83%	92	17%	540
	Perempuan	443	82%	95	18%	538
	Pemuda	494	86%	78	14%	572
Total						2717

DIAGRAM
TANGGAPAN RESPONDEN DI KABUPATEN BEKASI YANG SUDAH MENDENGAR



Sumber : Hasil Pengolahan Angket

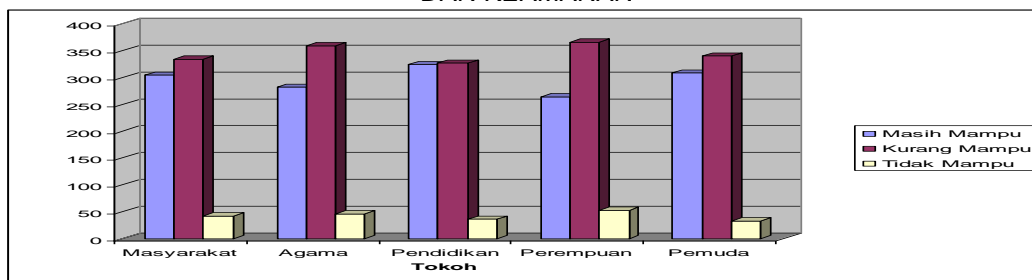
Responden dalam menjawab pertanyaan “Bila sudah mendengar, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu Tokoh masyarakat yang menjawab setuju yaitu 486 orang dan sisanya menjawab tidak setuju yaitu 58 orang , Tokoh agama yang menjawab setuju yaitu 469 orang dan sisanya menjawab tidak setuju yaitu 54, Tokoh pendidikan yang menjawab setuju yaitu 448 orang dan sisanya menjawab tidak

setuju yaitu 92 orang, Tokoh perempuan yang menjawab setuju yaitu 443 orang dan sisanya menjawab tidak setuju yaitu 95 orang, Tokoh pemuda yang menjawab setuju yaitu 494 orang dan sisanya menjawab tidak setuju yaitu 78 orang. Dengan demikian sebagian besar masyarakat cenderung setuju mengenai rencana pembentukan daerah otonom baru (pemekaran Kabupaten Bekasi).

TABEL
TINGKAT KEMAMPUAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BEKASI YANG SEKARANG DIRASAKAN SETUJU MAMPU DITINJAU DARI SEGI SOSIAL, EKONOMI, POLITIK, BUDAYA DAN KEAMANAN

Pertanyaan	Tokoh	Masih Mampu		Kurang Mampu		Tidak Mampu		Jumlah
		f	%	f	%	f	%	
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah kondisi pemerintahan kabupaten Bekasi yang sekarang dirasakan sudah mampu ditinjau dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya dan keamanan sehingga perlu dilakukan pemventukan daerah otonom?	Masyarakat	304	44.7	334	49.1	42	6.2	680
	Agama	282	41.0	359	52.3	46	6.7	687
	Pendidikan	324	47.2	327	47.6	36	5.2	687
	Perempuan	264	38.7	366	53.6	53	7.8	683
	Pemuda	308	45.2	340	49.9	33	4.8	681
Total								3418

DIAGRAM
TINGKAT KEMAMPUAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BEKASI YANG SEKARANG DIRASAKAN SETUJU MAMPU DITINJAU DARI SEGI SOSIAL, EKONOMI, POLITIK, BUDAYA DAN KEAMANAN



Sumber : Hasil Pengolahan Angket

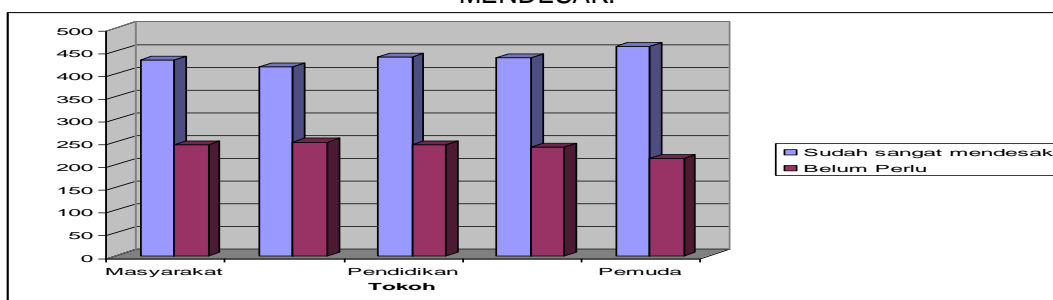
Responden dalam menjawab pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah Tingkat Kemampuan Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang Sekarang Dirasakan Setuju Mampu Ditinjau dari Segi Sosial, Ekonomi, Politik, Budaya dan Keamanan?”. Tokoh masyarakat yang menjawab masih mampu yaitu 304 orang , kurang mampu yaitu 334 orang ,dan sisanya menjawab tidak mampu yaitu 42 orang, Tokoh agama yang menjawab masih mampu yaitu 282 orang, kurang mampu yaitu 359 orang ,dan sisanya menjawab tidak mampu yaitu 46 orang, Tokoh pendidikan yang menjawab masih mampu

yaitu 324 orang , kurang mampu yaitu 327 orang dan sisanya menjawab tidak mampu yaitu 36 orang, Tokoh perempuan yang menjawab masih mampu yaitu 264 orang, kurang mampu yaitu 366 orang dan sisanya menjawab tidak mampu yaitu 53 orang, Tokoh pemuda yang menjawab masih mampu yaitu 308 orang, kurang mampu yaitu 340 orang dan sisanya yang menjawab tidak mampu yaitu 33 orang. Dengan demikian sebagian besar masyarakat cenderung menjawab kurang mampu terkait dengan tingkat kemampuan pemerintahan Kabupaten Bekasi.

TABEL
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU
(PEMEKARAN KABUPATEN BEKASI) SUDAH MENDESAK

Pertanyaan	Tokoh	Sudah sangat mendesak		Belum Perlu		Jumlah
		f	%	f	%	
4. Apakah menurut bapak/Ibu pembentukan daerah otonom baru (pemekaran Kabupaten Bekasi) sudah mendesak ?	Masyarakat	430	64%	244	36%	674
	Agama	415	62%	250	38%	665
	Pendidikan	438	64%	244	36%	682
	Perempuan	436	65%	239	35%	675
	Pemuda	461	68%	214	32%	675
Total						3371

DIAGRAM
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (PEMEKARAN KABUPATEN BEKASI) SUDAH MENDESAK.



Sumber : Hasil Pengolahan Angket

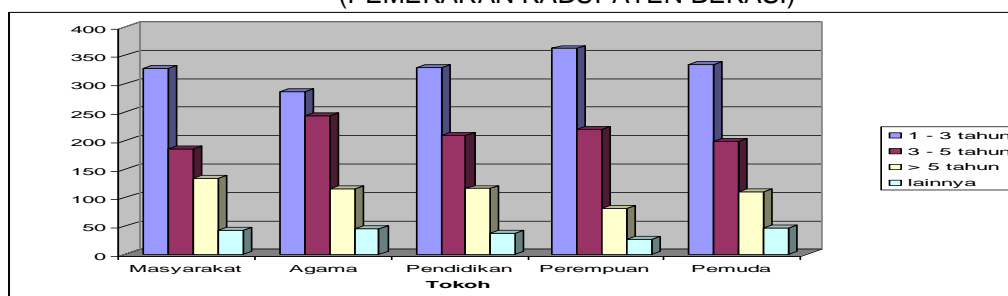
Responden dalam menjawab pertanyaan “Apakah menurut Bapak/Ibu Dilakukan Pembentukan Daerah Otonom Baru (Pemekaran Kabupaten Bekasi) Sudah mendesak ?” Tokoh masyarakat yang menjawab belum perlu yaitu 244 orang dan sisanya menjawab setuju sangat mendesak yaitu 430 orang, Tokoh agama yang menjawab belum perlu yaitu 250 orang dan sisanya menjawab setuju sangat mendesak yaitu 415 orang, Tokoh pendidikan yang menjawab belum perlu yaitu 244 orang dan

sisanya menjawab setuju sangat mendesak yaitu 438 orang, Tokoh perempuan yang menjawab belum perlu yaitu 239 orang dan sisanya menjawab setuju sangat mendesak yaitu 436 orang, Tokoh pemuda yang menjawab belum perlu yaitu 214 orang dan sisanya menjawab setuju sangat mendesak yaitu 461 orang. Dengan demikian sebagian besar masyarakat cenderung setuju sangat mendesak mengenai rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru (Pemekaran Kabupaten Bekasi).

TABEL
SAAT YANG TEPAT UNTUK PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (PEMEKARAN
KABUPATEN BEKASI)

Pertanyaan	Tokoh	1 - 3 tahun		3 - 5 tahun		> 5 tahun		Lain-nya		Jumlah
		f	%	f	%	f	%	f	%	
5. Bila mendesak, kapan saat yang tepat untuk pemekaran Kabupaten Bekasi tersebut dilakukan?	Masyarakat	327	47	186	27	134	19	43	6	690
	Agama	286	41	244	35	115	17	45	7	690
	Pendidikan	328	48	209	30	116	17	37	5	690
	Perempuan	362	52	220	32	81	12	27	4	690
	Pemuda	334	48	199	29	110	16	47	7	690
Total										3450

DIAGRAM : SAAT YANG TEPAT UNTUK PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU
(PEMEKARAN KABUPATEN BEKASI)



Sumber : Hasil Pengolahan Angket

Responden dalam menjawab pertanyaan “Bila mendesak, kapan saat yang tepat untuk Pembentukan Daerah Otonom Baru (Pemekaran Kabupaten Bekasi)dilakukan?”, Tokoh masyarakat yang menjawab waktu pemekaran kabupaten Bekasi 1-3 tahun yaitu 327 orang, 3-5 tahun yaitu 186 orang dan lebih dari 5 tahun yaitu 134 orang, Tokoh agama yang menjawab waktu pemekaran kabupaten Bekasi 1-3 tahun yaitu 286 orang, 3-5 tahun yaitu 115 orang dan lebih dari 5 tahun yaitu 115 orang, Tokoh pendidikan yang menjawab waktu pemekaran kabupaten Bekasi 1-3 tahun yaitu 328 orang, 3-5 tahun yaitu 209 orang dan lebih dari 5 tahun yaitu 116 orang, Tokoh perempuan yang menjawab waktu pemekaran kabupaten Bekasi 1-3 tahun yaitu 362 orang, 3-5 tahun yaitu 220 orang dan lebih dari 5 tahun yaitu 81 orang, Tokoh pemuda yang menjawab waktu pemekaran kabupaten Bekasi 1-3 tahun yaitu 334 orang, 3-5 tahun yaitu 119 orang dan lebih dari 5 tahun yaitu 110 orang. Dengan demikian masyarakat yang merasa untuk pembentukan daerah otonom baru

(pemekaran kabupaten bekasi) cenderung menginginkan perubahan dalam waktu 1-3 tahun.

Berdasarkan jawaban responden di lapangan, maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat 5 (lima) kecenderungan pembagian daerah otonom menurut aspirasi masyarakat Kabupaten Bekasi saat ini yaitu :

1. Kecenderungan 1 : daerah otonom baru dengan 13 kecamatan dan daerah otonom induk 10 kecamatan.

DIAGRAM
DAERAH OTONOM BARU KECENDERUNGAN 1

Cibitung, Tambelang, Sukatani, Pebayuran, Cabangbungin, Muaragembong, Tambun Utara Suka Wangi, Taruma Jaya, Babelan, Karang Bahagia, Tambun Selatan, Sukakarya

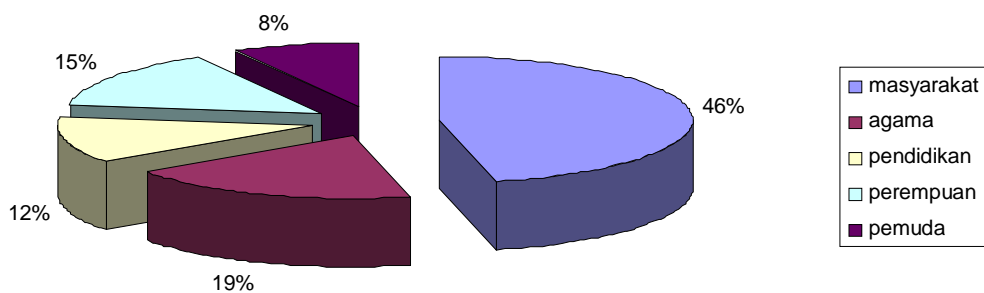
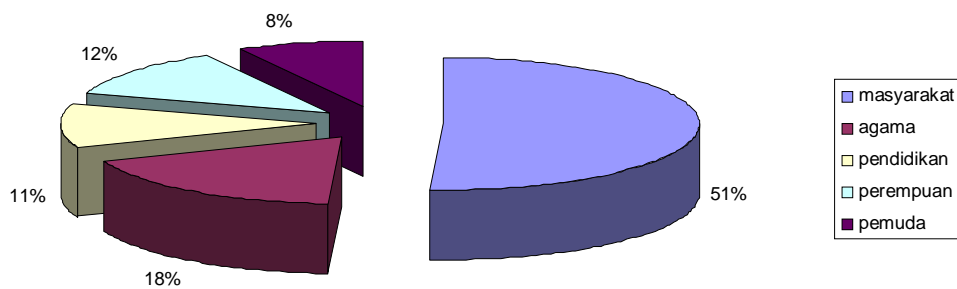


DIAGRAM
DAERAH OTONOM INDUK KECENDERUNGAN 1

Cibarusah, Bojong Mangu, Serang Baru, Setu, Cikarang Barat, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat, Cikarang Timur, Cikarang Utara, Kedungwaringin



2. Kecenderungan 2 : daerah otonom baru dengan 11 kecamatan dan daerah otonom induk 12 kecamatan.

DIAGRAM
DAERAH OTONOM BARU KECONDONGAN 2

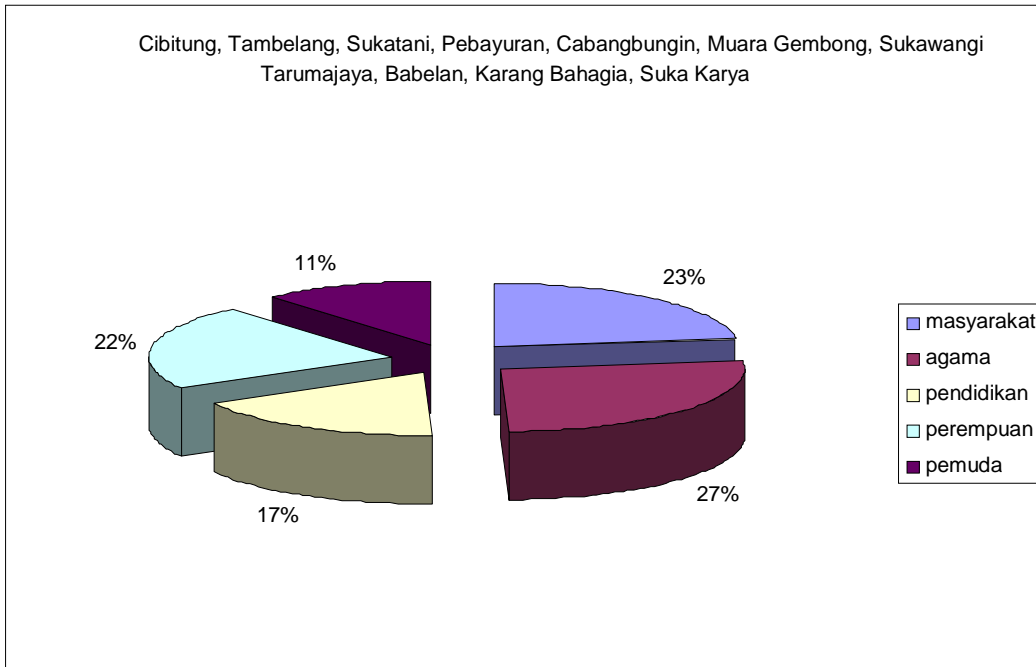
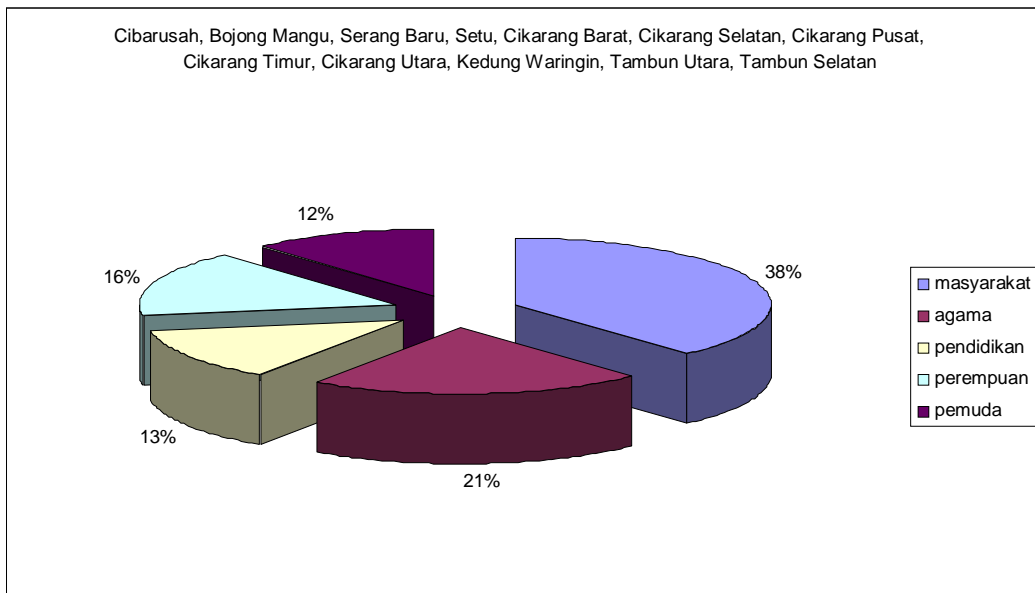


DIAGRAM
DAERAH OTONOM INDUK KECONDONGAN 2



3. Kecenderungan 3 : daerah otonom baru dengan 11 kecamatan dan daerah otonom induk 12 kecamatan.

DIAGRAM
DAERAH OTONOM BARU KECENDERUNGAN 3

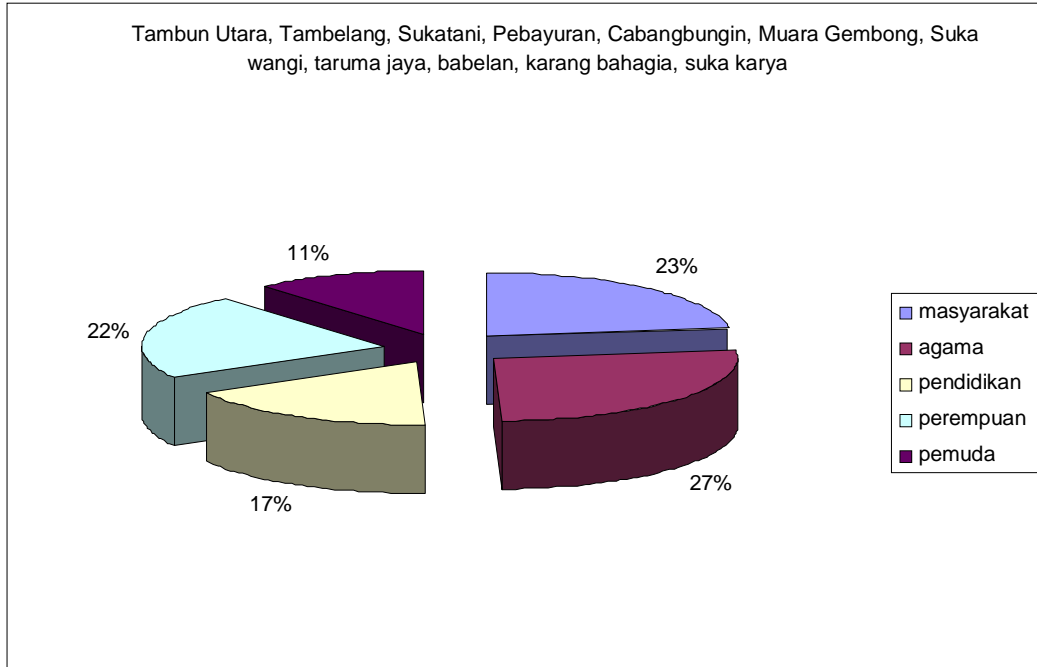
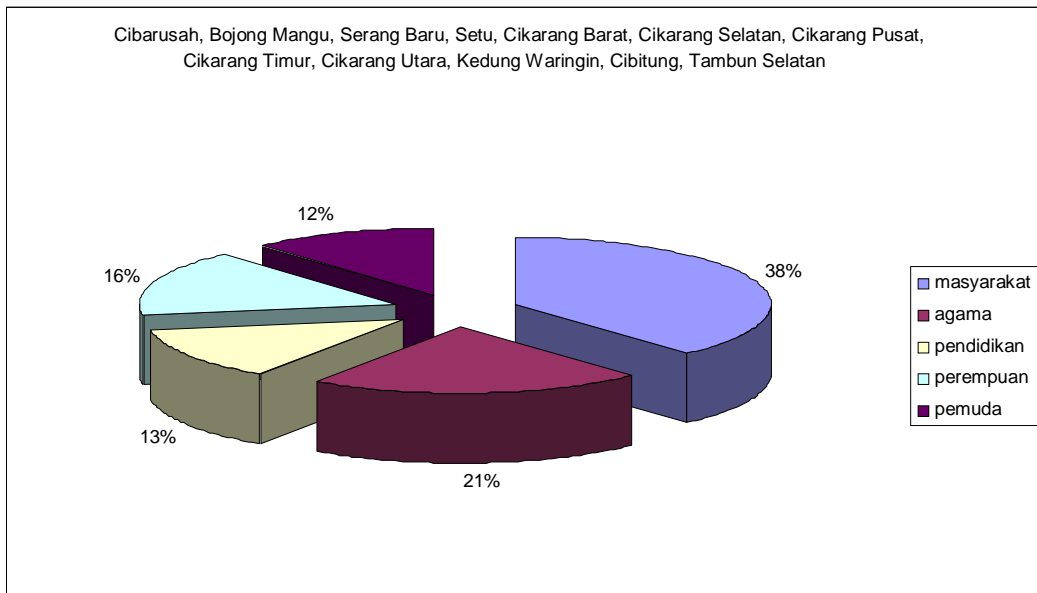


DIAGRAM
DAERAH OTONOM INDUK KECENDERUNGAN 3



4. Kecenderungan 4 : daerah otonom baru dengan 10 kecamatan dan daerah otonom induk 13 kecamatan.

DIAGRAM
DAERAH OTONOM BARU KEKENDERUNGAN 4

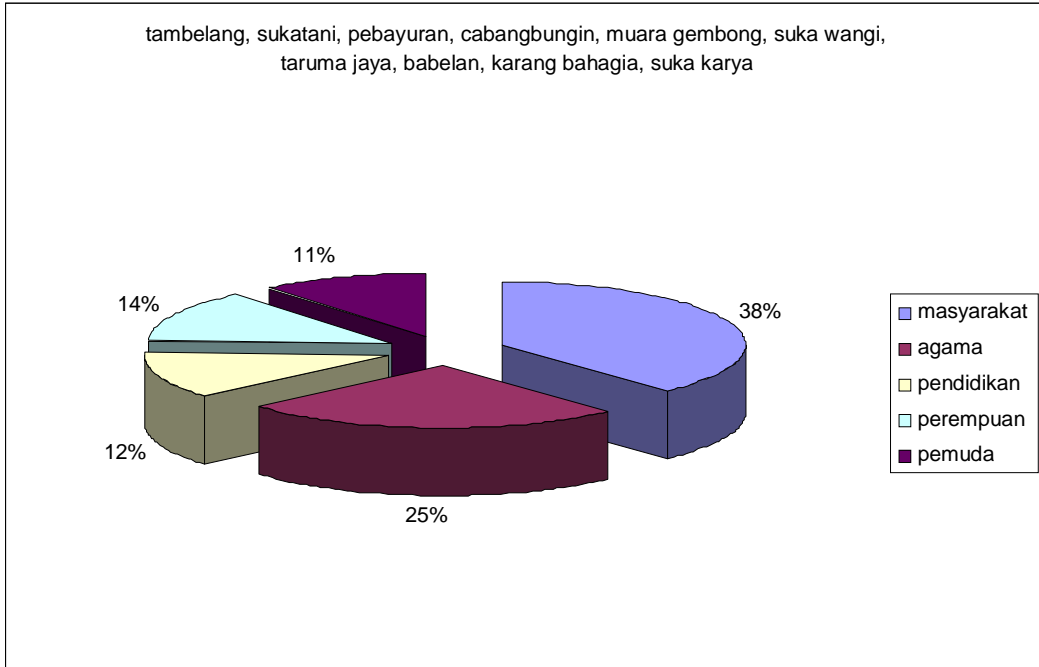
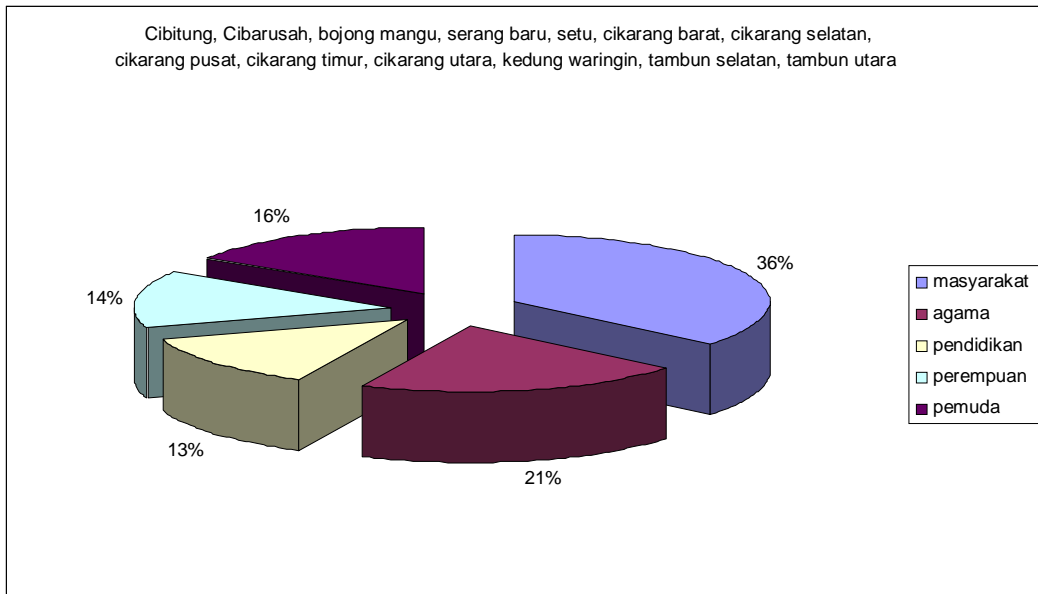


DIAGRAM
DAERAH OTONOM INDUK KEKENDERUNGAN 4



5. Kecenderungan 5 : daerah otonom baru dengan 9 kecamatan sebagai calon kota baru dan daerah otonom induk 14 kecamatan

DIAGRAM
DAERAH OTONOM BARU KECENDERUNGAN 5

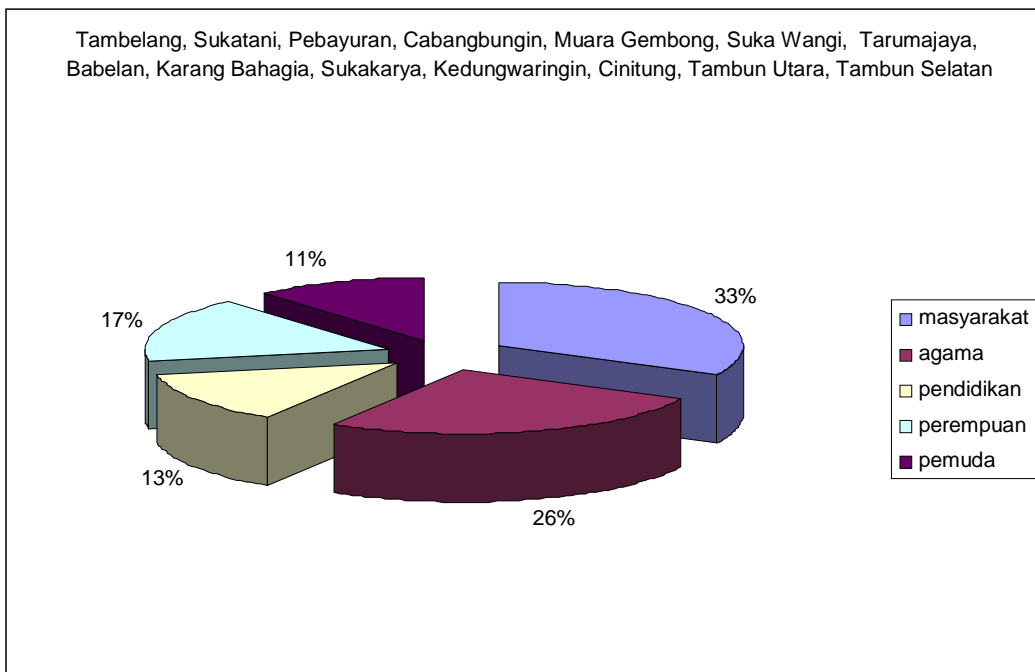
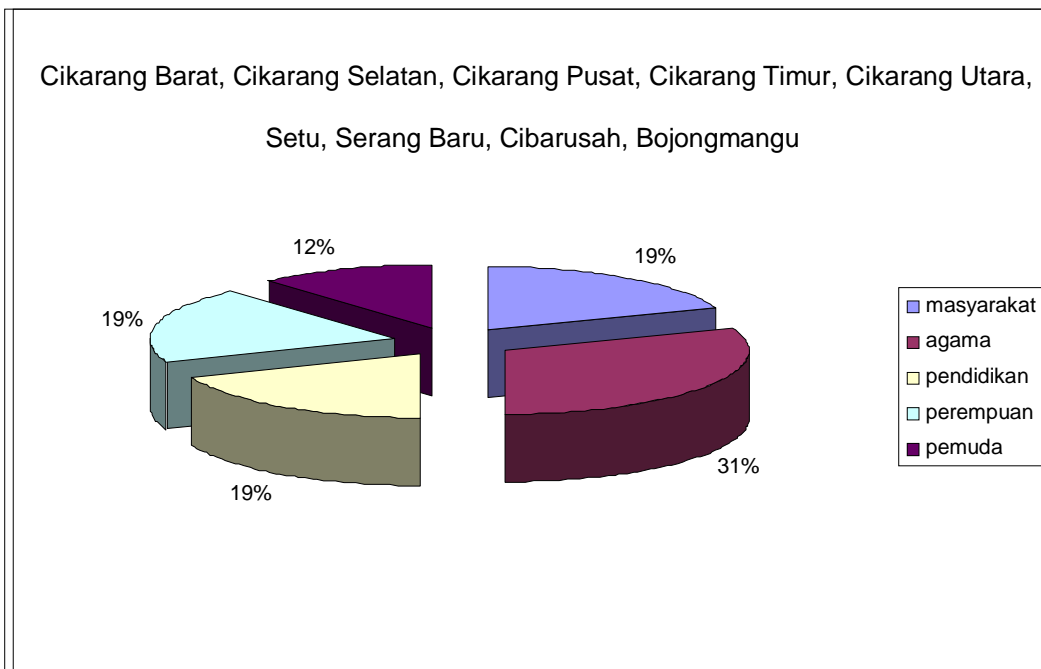


DIAGRAM
DAERAH OTONOM BARU KECENDERUNGAN 5



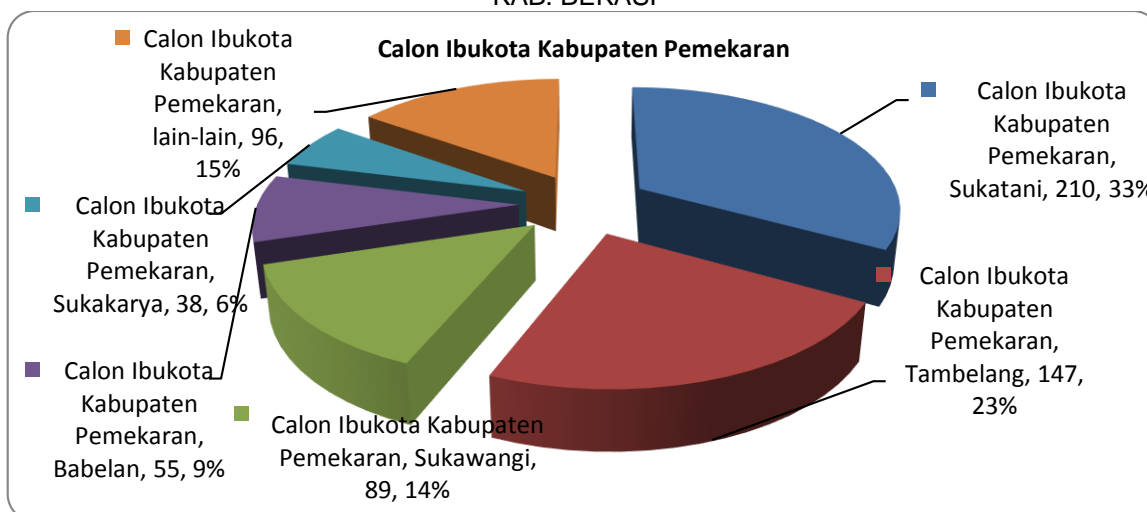
Tentang pertanyaan mengenai :
 “Dimana kedudukan pusat pemerintahan/ibu kota daerah otonom baru yang strategis untuk alternative ke-1?”,

hasilnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut :

TABEL
 PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH BARU YANG STRATEGIS APABILA TERJADI PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU

Pertanyaan	Tokoh	Kecamatan						Total
		Suka-tani	Tambe-lang	Suka-wangi	Babe-lan	Suka-karya	lain-lain	
Menurut Anda dimanakah calon ibukota daerah pemekaran yang paling strategis?	Masyarakat	435	303	184	119	79	198	1318
	Agama	174	121	74	47	32	79	527
	Pendidikan	130	91	55	36	24	59	395
	Perempuan	87	61	37	24	16	40	264
	Pemuda	43	30	18	12	8	20	132
	Total		870	606	369	237	158	395

DIAGRAM
 CALON IBUKOTA KABUPATEN PEMEKARAN MENURUT PERSEPSI TOKOH-TOKOH DI KAB. BEKASI



Sumber : Hasil Pengolahan Angket

Berdasarkan penilaian masing-masing calon daerah otonom di atas, maka perlu dievaluasi dan ditetapkan tingkat kemampuan calon daerah otonom sekaligus dikaji secara cermat kekuatan dan kelemahan masing-masing indikator sebagai dasar atau masukan rekomendasi kebijakan pembinaan peningkatan kemampuan pada setiap calon daerah otonom untuk menjamin dan menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Total skor dalam jumlah tertentu ditetapkan sebagai standar evaluasi untuk menetapkan apakah suatu calon daerah otonom **sangat mampu, mampu, kurang mampu, tidak mampu** dan **sangat tidak**

mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Adapun kriteria yang ditetapkan untuk kelulusan atau rekomendasi untuk menjadi daerah otonom baru, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

TABEL
 KATEGORI PENILAIAN

KATEGORI	NILAI	KETERANGAN
1. Sangat Mampu	420-500	Rekomendasi
2. Mampu	340-419	Rekomendasi
3. Kurang Mampu	260-339	Ditolak
4. Tidak Mampu	180-259	Ditolak
5. Sangat Tidak Mampu	100-179	Ditolak

Suatu daerah direkomendasikan menjadi daerah otonom apabila daerah induk dan calon daerah yang akan dibentuk mempunyai nilai total nilai dengan kategori **sangat mampu** (420-500) atau **mampu** (340-419), **dan** perolehan jumlah nilai faktor **kependudukan** (80-100), **kemampuan ekonomi** (60-75), faktor **potensi daerah** (60-75), dan faktor **kemampuan keuangan** (60-75).

Usulan pembentukan daerah ditolak apabila daerah induk atau calon daerah yang akan dibentuk mempunyai total nilai dengan kategori **kurang mampu**, **tidak**

mampu dan **sangat tidak mampu** dalam menyelenggarakan otonomi daerah, **atau** perolehan jumlah nilai faktor kependudukan kurang dari 80, atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau perolehan jumlah nilai faktor potensi daerah kurang dari 60, atau perolehan jumlah nilai faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

Berdasarkan 5 (lima) alternatif pemekaran yang telah ditentukan sebagai wilayah kajian, maka diperoleh hasil analisis sebagaimana tabel berikut :

TABEL
PERBANDINGAN KEMAMPUAN
KABUPATEN BEKASI DAN CALON DAERAH OTONOM

NO	VARIABEL	SKOR x BOBOT											
		KAB. BEKASI (<i>existing</i>)	CALON DAERAH INDUK					CALON DAERAH PEMEKARAN					
			ALTERNATIF					ALTERNATIF					
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
1.	Kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80
2.	Kemampuan Ekonomi	75	75	75	75	75	75	75	<u>45</u>	65	<u>45</u>	70	
3.	Potensi Daerah	67	71	67	68	68	63	63	66	64	66	63	
4.	Kemampuan Keuangan	70	70	65	70	65	75	75	75	75	75	75	
5.	Sosial Budaya	17	19	13	13	13	11	11	17	15	17	23	
6.	Sosial Politik	20	17	21	19	21	16	19	17	17	17	17	
7.	Luas Daerah	21	17	17	17	17	19	19	11	8	8	25	
8.	Pertahanan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
9.	Keamanan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
10	Tingkat Kesejahteraan	25	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	
11	Rentang Kendali	13	5	5	8	8	18	18	18	18	18	20	
	Jumlah	420	411	400	407	404	414	412	<u>381</u>	394	<u>378</u>	405	

Sumber : Hasil Perhitungan

Atas dasar perhitungan di atas, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

a. Dari hasil perhitungan ternyata calon daerah pemekaran pada alternatif II dan IV, tidak **dapat direkomendasikan** untuk menjadi daerah otonom. Meskipun nilai total yang diperoleh kedua calon daerah pemekaran pada kedua alternatif tersebut di atas skor 420, akan tetapi skor untuk kemampuan ekonomi hanya mencapai skor 45 yang berarti masih berada di bawah nilai minimum yang ditetapkan untuk nilai kemampuan ekonomi. Dengan demikian alternatif II dan IV **tidak dapat direkomendasikan** untuk menjadi daerah otonom.

b. Prinsip utama dalam melakukan pemekaran wilayah adalah Pemekaran kabupaten **tidak boleh** mengakibatkan calon daerah otonom induk nantinya menjadi lemah atau tidak mampu menjalankan otonominya, atau perbedaan kemampuan antara calon daerah otonom yang akan dibentuk dan calon daerah otonom induk setelah terjadi pemekaran **tidak boleh** memiliki kesenjangan yang tajam. Dari Tabel diatas sebagai hasil analisis dapat diketahui selisih antara calon daerah otonom yang dapat dihitung sebagai berikut :

TABEL
SELISIH SKOR ANTAR CALON DAERAH OTONOM

No.	Alternatif Pemekaran	Selisih Antar Calon Daerah Otonom (Induk-Pemekaran)	Keterangan
1.	Alternatif I	$(411 - 412) = 1 (-)$	Rekomendasi
2.	Alternatif II	$(400 - 381) = 19 (+)$	Ditolak
3.	Alternatif III	$(407 - 394) = 13 (+)$	Rekomendasi
4.	Alternatif IV	$(404 - 378) = 26 (+)$	Ditolak
5.	Alternatif V	$(414 - 405) = 9 (+)$	Rekomendasi

Tanda negatif pada hasil pengurangan di atas menunjukkan bahwa potensi calon daerah otonom pemekaran lebih besar dibandingkan calon daerah otonom induk. Sedangkan tanda positif berarti bahwa potensi calon daerah otonom induk lebih besar dibanding calon daerah otonom pemekaran. Tabel di atas menunjukkan bahwa selisih skor yang paling minimal adalah Alternatif I dengan selisih 1(-), sedangkan yang tertinggi adalah alternative IV dengan selisih 26(+). Akan tetapi hasil perhitungan indikator alternative II dan IV ditolak karena faktor kemampuan ekonominya tidak memenuhi persyaratan. Namun tidak berarti bahwa alternatif II dan IV sama sekali tertutup kemungkinan untuk dapat dijadikan pilihan kebijakan oleh karena skor total cukup memenuhi syarat untuk dimekarkan. Alternatif II dan IV dapat dijadikan pilihan kebijakan pemekaran dengan catatan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam waktu singkat harus mengembangkan dulu kemampuan ekonomi di wilayah calon daerah pemekaran hingga mencapai skor kemampuan ekonomi yang memenuhi persyaratan.

Jadi prioritas pilihan tindakan untuk pemekaran berdasarkan selisih total skor seluruh indikator adalah :

- 1) Alternatif I (calon kabupaten induk 10 kecamatan dan calon kabupaten pemekaran 13 kecamatan)
- 2) Alternatif V (calon kabupaten induk 14 kecamatan dan calon kota pemekaran 9 kecamatan)
- 3) Alternatif III (calon kabupaten induk 12 kecamatan dan calon kabupaten pemekaran 11 kecamatan)
- 4) Alternatif II (calon kabupaten induk 12 kecamatan dan calon kabupaten pemekaran 11 kecamatan).
- 5) Alternatif IV (calon kabupaten induk 13 kecamatan dan calon kabupaten pemekaran 10 kecamatan).

Keseimbangan kemampuan riil dan potensi yang dimiliki masing-masing antara daerah yang akan dibentuk dan calon daerah otonom induk setelah terjadi pemekaran harus relatif terjaga. Oleh karena itu sebaiknya pilihan tindakan berdasarkan selisih total skor paling rendah. Pemekaran juga harus menjamin adanya peningkatan pelayanan publik,

demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat baik pada calon daerah otonom yang akan dibentuk maupun calon daerah otonom induk setelah dimekarkan.

Pilihan prioritas pemekaran Kabupaten Bekasi sebaiknya ditentukan menurut kriteria berdasarkan selisih terendah dari setiap calon daerah otonom hasil pemekaran baik untuk calon daerah otonom yang akan dibentuk maupun calon daerah otonom induk setelah dimekarkan/calon daerah otonom induk setelah dimekarkan, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Kriteria ini dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pemekaran kabupaten **tidak boleh** mengakibatkan calon daerah otonom induk nantinya menjadi lemah atau tidak mampu menjalankan otonominya;
2. Perbedaan kemampuan antara calon daerah otonom yang akan dibentuk dan calon daerah otonom induk setelah terjadi pemekaran **tidak boleh** memiliki kesenjangan yang tajam;
3. Keseimbangan kemampuan riil dan potensi yang dimiliki masing-masing antara kabupaten yang akan dibentuk dan calon daerah otonom induk setelah terjadi pemekaran harus relatif terjaga;
4. Pemekaran harus menjamin adanya peningkatan pelayanan publik, demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat baik pada calon daerah otonom yang akan dibentuk maupun calon daerah otonom induk setelah terjadi pemekaran.

Berdasarkan hasil analisis, maka terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan yang dapat diambil pada calon daerah otonom yang akan dibentuk dengan calon daerah otonom induk antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan ekonomi daerah melalui kebijakan :
 - Membuka peluang investasi dengan memperhatikan sub sektor PDRB yang paling elastis dalam meningkatkan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja.
2. Pengembangan Potensi Daerah
 - Peningkatan kuantitas lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan seperti

Koperasi, pegadaian dan asuransi terutama pada pusat pertumbuhan ekonomi.

- Peningkatan kuantitas dan kualitas penyebaran pusat perekonomian terutama pertokoan.
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan terutama jenjang pendidikan SLTA menurut kebutuhan daerah.
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat berupa rumah sakit, puskesmas dan poliklinik.
 - Penyediaan jasa pelayanan umum yang terjangkau oleh masyarakat terutama kendaraan umum, kemudahan kepemilikan fasilitas kendaraan bermotor roda 2, penyediaan sarana komunikasi seperti telepon, listrik dan kantor pos dan jasa-jasa lainnya.
 - Penyediaan sarana pariwisata/rekreasi bagi masyarakat dan penyediaan fasilitas akomodasi yang memadai seperti rumah makan.
 - Membuka lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Peningkatan Kemampuan Keuangan
 - Penggalan potensi PAD.
 - Efisiensi pengeluaran rutin melalui penetapan SAB dan SPM.
 4. Pengembangan Kapasitas Sosial Budaya
 - Pembangunan sarana dan prasarana sosial bagi masyarakat seperti tempat pertunjukan seni/kesenian dan panti sosial.
 5. *Pengembangan Kapasitas Sosial Politik*
 - *Fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta peningkatan pembangunan kesadaran politik masyarakat.*
 6. Pemanfaatan Luas Daerah
 - Efisiensi dan optimalisasi lahan untuk sektor industri dan perdagangan, serta kawasan pemukiman penduduk.
 7. Pertahanan dan Keamanan
 - Peningkatan kemampuan pertahanan rakyat, keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat.

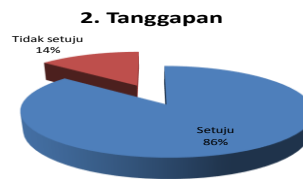
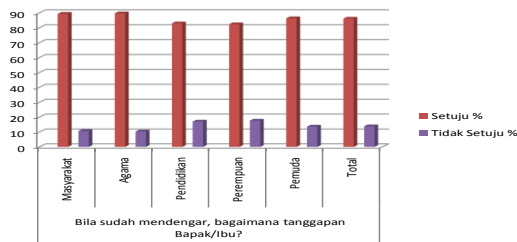
8. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
 - Peningkatan taraf hidup masyarakat yang diukur dari pendidikan, kesehatan dan daya beli.
9. Peningkatan jangkauan pelayanan
 - Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan.
 - Optimalisasi peran Kecamatan sebagai pusat pelayanan.

1. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian terhadap kemampuan daerah, ternyata Kabupaten Bekasi memiliki skor 420. Ini berarti Kabupaten Bekasi termasuk kategori **sangat mampu** dan **dapat direkomendasikan** untuk dimekarkan.
2. Berdasarkan jawaban responden hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui kuesioner menunjukkan bahwa lebih dari 80% persen responden dari 2717 responden yang memberikan jawaban menyatakan setuju untuk pemekaran di Kabupaten Bekasi.

REKOMENDASI

Hasil penelitian terhadap tingkat kemampuan daerah Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :

Diagram 1
Tanggapan Masyarakat Terhadap Pemekaran



N = 2717

Hasil kajian tersebut diatas sejalan dengan hasil jajak pendapat dari Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bekasi dari 187 Desa diperoleh kesimpulan bahwa :

- a. Sebanyak 178 BPD atau sekitar 80% setuju pemekaran
 - b. Sebanyak 29 BPD atau sekitar 16% tidak setuju pemekaran
 - c. Sebanyak 9 BPD atau sekitar 4% belum memberikan pendapat (data belum masuk).
3. Berdasarkan jawaban responden terdapat 5 (lima) kecenderungan wilayah pemekaran, yaitu :
 - a. Alternatif I terdiri dari :
 - Calon kabupaten induk dengan 10 kecamatan : Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cikarang barat, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cibarusah, Bojongmangu, Serang Baru, Setu, Kedungwaringin.

- Calon kabupaten pemekaran dengan 13 kecamatan : Cibitung, Tambun Utara, Tambun Selatan, Karang Bahagia, Tambelang, Sukatani, Pebayuran, Sukawangi, Tarumajaya, Babelan, Sukakarya, Cabangbungin, Muaragembong.
- b. Alternatif II terdiri dari :
 - Calon kabupaten induk dengan 12 kecamatan : Setu, Serang Baru, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Timur, Kedungwaringin, Cikarang Utara, Cibitung, Cikarang Barat, Tambun Selatan.
 - Calon kabupaten pemekaran dengan 11 kecamatan: Karang Bahagia, Tambun Utara, Babelan, Tarumajaya, Tambelang, Sukawangi, Sukatani, Sukakarya,

- Pebayuran, Cabangbungin, Muaragembong.
- c. Alternatif III terdiri dari :
- Calon kabupaten induk dengan 12 kecamatan : Setu, Serang Baru, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Timur, Kedungwaringin, Cikarang Utara, Tambun Utara, Cikarang Barat, Tambun Selatan.
 - Calon kabupaten pemekaran dengan 11 kecamatan : Karang Bahagia, Cibitung, Babelan, Tarumajaya, Tambelang, Sukawangi, Sukatani, Sukakarya, Pebayuran, Cabangbungin, Muaragembong.
- d. Alternatif IV terdiri dari :
- Calon kabupaten induk dengan 13 kecamatan : Setu, Serang Baru, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Timur, Kedungwaringin, Cikarang Utara, Cibitung, Cikarang Barat, Tambun Selatan, Tambun Utara.
- Calon kabupaten pemekaran dengan 10 kecamatan : Karang Bahagia, Babelan, Tarumajaya, Tambelang, Sukawangi, Sukatani, Sukakarya, Pebayuran, Cabangbungin, Muaragembong.
- e. Alternatif V terdiri dari :
- Calon kabupaten induk dengan 14 kecamatan : Kedungwaringin, Cibitung, Tambun Selatan, Tambun Utara, Karang Bahagia, Babelan, Tarumajaya, Tambelang, Sukawangi, Sukatani, Sukakarya, Pebayuran, Cabangbungin, Muaragembong.
 - Calon kota pemekaran dengan 9 kecamatan : Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cikarang barat, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cibarusah, Bojongmangu, Serang Baru, Setu.

TABEL
SELISIH SKOR ANTAR CALON DAERAH OTONOM

No.	Alternatif Pemekaran	Selisih Antar Calon Daerah Otonom (Induk-Pemekaran)	Keterangan
1.	Alternatif I	$(411 - 412) = 1 (-)$	Rekomendasi
2.	Alternatif II	$(400 - 381) = 19 (+)$	Ditolak
3.	Alternatif III	$(407 - 394) = 13 (+)$	Rekomendasi
4.	Alternatif IV	$(404 - 378) = 26 (+)$	Ditolak
5.	Alternatif V	$(414 - 405) = 9 (+)$	Rekomendasi

4. Pilihan pengembangan pemekaran Kabupaten Bekasi didasarkan atas besaran selisih kemampuan relatif wilayah dari hasil kajian akademis berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007, dengan urutan alternatif sebagai berikut :
- 1) Alternatif I, dapat langsung direkomendasikan karena memenuhi jumlah skor total dan skor untuk faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan.
 - 2) Alternatif V, dapat langsung direkomendasikan karena memenuhi jumlah skor total dan skor untuk faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan.
 - 3) Alternatif III dapat langsung direkomendasikan karena memenuhi jumlah skor total dan skor untuk faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan..
 - 4) Alternatif II dapat direkomendasikan, dengan catatan dikembangkan dulu kemampuan ekonominya hingga mencapai skor yang memenuhi persyaratan.
 - 5) Alternatif IV dapat direkomendasikan, dengan catatan dikembangkan dulu kemampuan

ekonominya hingga mencapai skor yang memenuhi persyaratan.

5. Adapun untuk rekomendasi langkah lebih lanjut sebagai bagian dari rencana pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi setelah dilakukannya kajian ini adalah :
 - 1) Penentuan wilayah kecamatan yang akan dimekarkan sesuai hasil perhitungan potensi dan pertimbangan lainnya, dalam bentuk Keputusan Bupati.
 - 2) Penentuan ibukota calon daerah otonom melalui pengkajian yang lebih teknis tentang wilayah yang strategis untuk dijadikan ibukota baru, seperti ketersediaan air, aksesibilitas, dan lain-lain. Wilayah calon ibukota daerah otonom yang baru juga harus dilengkapi dengan surat keterangan kepemilikan tanah yang sah dari pemerintah.
 - 3) Melakukan pemotretan calon daerah pemekaran dan daerah induk untuk memastikan batas-batas daerah dan calon ibukota dengan melibatkan instansi berwenang antara lain dengan BAKOSURTANAL.
 - 4) Menyiapkan dokumen kelengkapan pemekaran untuk diajukan ke DPRD Propinsi dan Gubernur Jawa Barat, antara lain dokumen aspirasi yakni Keputusan BPD tentang persetujuan pemekaran, Hasil Kajian Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan DPRD Kab. Bekasi tentang persetujuan pemekaran, serta peta wilayah yang akan dimekarkan.

DAFTAR ACUAN

- Anderson, JE, *Public Policy Making*, Halt Renhart and Winston USA, 1978.
- Badri J., 1953, *Otonomi Daerah – Masalah dan Beberapa Perbandingan*, Tintamas, Jakarta.
- Basri, Faisal, 2005, *Kita Harus Berubah*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Charless H. Lenville, et. al, *Public Administration Challenges, Choices, Consequences*. Scott Foreman/Little Brown Higher Education : Glenview, Illionis, 1990.
- Charless Wolf, Jr., *Market or Government : Choosing Between Imperfect*

- Alternative*. The Mit Press, Cambridge, Massachusetts, 1998.
- Denhardt, Robert B., *Theory of Public Organization*, Brooks Colle Publishing Company Monterey California USA, 1979.
- Dunn, William N., *Public Policy Analysis an Introduction*, Prentice Hall Inc. New Jersey, 1994.
- Dwiyanto, Agus, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Fisipol UGM, 1995.
- Edward III, George, *Implementing Public Policy*, Congressional Quartely Press Washington DC, 1980.
- Effendi, Sofian, *Kebijakan Pembinaan Organisasi Pelayanan Publik (Percikan Pemikiran Awal)*, Fisipol UGM, 1995.
- Frederickson, *Administrasi Negara Baru*, LP3ES Jakarta, 1984.
- Grindle MS, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princenton University Press, New Jersey, 1980.
- Goggin, Malcom II, *Implementation Theory and Practice – Toward a Third General*, Illinois, London England, 1990.
- James L. Perry, Ed. 1990, *Handbook of Public Administration*, Jossey Bass Inc, San Francisco, California, 1990.
- Jones, Charles O., *An Introduction to The Study of Public Policy*, Brook/Cole Publishing Company Montere California, 1984.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit, Jogjakarta.
- Nasir, M. Safar, dkk, 2003, *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah* (Prosiding Seminar Nasional), UAD Press, Yogyakarta.
- , 1996. *Membahas Pembangunan Desa*, Jakarta: Aditya Media.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Oentarto, dkk, 2004, *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*, Samitra Media Utama, Jakarta.
- Pranarka A.W. dan Ony S. Prijono, 1996, *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS.
- Rasyid, Ryaas, *Makna Pemerintahan*, Wasrif Watampone, Jakarta, 2001.

- Ripley, Randall B. and Franklin Grace A.,
Policy Implementation and Bureaucracy, The Dorsey Press,
Chicago, Illinois, ...
- Sadu Wasistiono, 2002 *Esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai)* Alqaprint Jatinangor, 2002.
- , 2001, *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Alqaprint, Jatinangor.
- Sarundajang, S.H., 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Syaukani, H.R., dkk, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesartuan*, Pustaka Pelajar Offset, Jogjakarta.

- Peraturan – Peraturan
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007
tentang Tatacara Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan
Daerah.